

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 1 Tanjung dan SD Negeri 5 Arcawinangun Kabupaten Banyumas, yaitu:

1. Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sub bagian Pendidikan Dasar, Staff bagian Pendidikan Dasar, Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah dan orang tua siswa. Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kabupaten Banyumas tidak melibatkan pihak ketiga atau pihak swasta.
2. Tujuan pemerintah dalam melaksanakan program pendidikan inklusi masih kurang jelas. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang mendukung program inklusi dan tidak ada pembagian tugas secara jelas.
3. SD Negeri 1 Tanjung memiliki visi dan misi khusus pendidikan inklusi dan manajemen inklusi, sedangkan SD Negeri 5 Arcawinangun tidak memiliki visi dan misi khusus dan manajemen inklusi.
4. Berdasarkan aspek kerumitan dan koordinasi pengembangan pendidikan inklusi, masih banyak masalah yang terjadi dalam

implementasi kebijakan pendidikan inklusi, seperti kurangnya kesiapan sekolah, SDM , sarana dan prasarana, serta dana.

5. Koordinas pengembangan pendidikan inklusi antara pemerintah daerah dengan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sudah cukup baik.
6. Partisipasi setiap unit pelaksana implementasi kebijakan pendidikan inklusi sudah cukup baik. Semua unit pemerintah dari pusat sampai tingkat yang paling rendah termasuk masyarakat ikut berpartisipasi.
7. Berdasarkan segi faktor yang tidak terkendali, faktor kurangnya sumber dana atau anggaran program merupakan faktor yang sangat kompleks. Hal ini dikarenakan faktor tersebut dapat mempengaruhi indikator yang lainnya, seperti SDM serta sarana dan prasarana yang ada.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, SD Negeri 1 Tanjung dan SD Negeri 5 Arcawinangun agar implementasi program pendidikan inklusi mengarah ke arah yang lebih baik lagi, yaitu:

1. Perbaiki dari segi peraturan yang jelas. Sebaiknya pemerintah daerah membuat secara tertulis peraturan tata cara sekolah reguler menjadi sekolah inklusi.

2. Perbaiki dari segi SOP yang ada disekolah. Sebaiknya dibuat secara tertulis mengenai tata cara pendaftaran dan peraturan siswa ABK, agar semuanya bisa dilihat dengan jelas.
3. Berdasarkan aspek masalah yang ada yaitu anggaran yang terbatas. Sarana dan prasarana dari segi kelengkapan dan jumlahnya perlu ditingkatkan. Apabila sarana dan prasarana lengkap, maka anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) akan memperoleh kemudahan dalam proses belajar mengajar. Penambahan jumlah tenaga guru pembimbing khusus dan pelatihan terhadap guru-guru dilakukan secara terus menerus dan rutin, tidak hanya untuk sekolah yang belum menjadi sekolah inklusi tetapi yang sudah menjadi sekolah inklusi juga.

